

UPAYA CORDAID DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2016-2022

Defa Saputra Pratama Hariyanto¹, Etha Pasan²✉

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: ethapasan58@gmail.com

Article history

Received 2025-03-18 | Accepted 2025-04-26 | Published 2025-05-25

Abstrak

Krisis kemanusiaan di Afghanistan disebabkan oleh "Perang Melawan Terorisme" yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Taliban, yang berdampak besar pada hampir setiap sektor kehidupan dan menempatkan negara ini dalam status Keadaan Darurat Kemanusiaan Kompleks. Cordaid, sebuah organisasi kemanusiaan internasional, telah berupaya mengatasi krisis ini melalui berbagai program seperti Bright Future, Shelter for Women, dan The Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). Meskipun upaya Cordaid memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi beberapa tantangan di Afghanistan, organisasi ini belum mampu sepenuhnya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi. Hal ini karena inisiatif yang dilakukan, meskipun berharga, belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mendesak dan lebih luas yang dihadapi Afghanistan yang mencerminkan kompleksitas dan sifat multifaset dari krisis tersebut.

Kata Kunci: Cordaid, Krisis Kemanusiaan, Afghanistan

CORDAID'S EFFORTS TO ADDRESS THE HUMANITARIAN CRISIS IN AFGHANISTAN IN 2016-2022

Abstract

The humanitarian crisis in Afghanistan resulted from the U.S. "War on Terrorism" against the Taliban, severely impacting almost every sector of life and placing the country in a state of Complex Humanitarian Emergency. Cordaid, an international humanitarian organization, has actively worked to address the crisis through programs such as Bright Future, Shelter for Women, and The Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). While Cordaid's efforts have made significant contributions in addressing some of Afghanistan's challenges, the organization has been unable to fully resolve the country's humanitarian crisis. This is because its initiatives, though valuable, do not fully align with the broader and more urgent needs of Afghanistan, highlighting the complex and multifaceted nature of the crisis.

Keywords: Cordaid, Humanitarian Crisis, Afghanistan

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Defa Saputra Pratama Hariyanto, Etha Pasan

1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis kemanusiaan di dunia, selain bencana alam dan masalah kesehatan. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh perselisihan antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama yang kemudian mengakibatkan banyaknya kerugian baik dalam hal ekonomi maupun sosial di kawasan terjadinya konflik tersebut sehingga tak jarang menimbulkan suatu kondisi krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik ditemukan terjadi di negara Afghanistan. Negara ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam hal perselisihan atau konflik antara faksi-faksi yang bertikai secara internal, salah satu konflik yang menjadi penyebab krisis kemanusiaan di Afghanistan adalah invasi yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2001, kondisi ini diawali dengan terjadinya tragedi aksi terorisme 11 September (9/11) tahun 2001 di Amerika Serikat (AS) oleh organisasi al- Qaeda. Tragedi itu memicu Amerika Serikat untuk memasuki dan melakukan invasi militer di Afghanistan dengan tujuan menghancurkan organisasi tersebut dan memicu konflik antara Amerika Serikat dan rezim berkuasa Taliban akhirnya terus terjadi sejak saat itu dan memperburuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi di berbagai daerah di negara Afghanistan. (Bergen, 2021)

Pertempuran antara Taliban dan pasukan pemerintah di Afghanistan meningkat pada tahun 2015, meningkatnya kekerasan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan bagi semua pihak termasuk warga sipil. Dengan berbagai serangan bom bunuh diri, penculikan, penggunaan alat peledak buatan dan serangan yang ditargetkan oleh Taliban dan pemberontak lainnya yang menyebabkan banyaknya korban jiwa baik itu dari pihak Amerika Serikat, kelompok bersenjata Taliban, dan warga sipil. Jumlah korban yang terbunuh selama operasi militer pemerintah, khususnya serangan darat, juga meningkat pada saat itu dan terus berlanjut. (Human Rights Watch, 2016). Selain korban jiwa pada anggota militer, pemerintahan dan warga sipil konflik ini juga menimbulkan besarnya angka pengungsian oleh warga Afghanistan. Sejak tahun 2001, sekitar 3,8 juta warga Afghanistan telah mengungsi secara internal atau telah meninggalkan negara itu, terutama ke negara tetangga mereka yaitu Pakistan, Iran dan juga beberapa wilayah di Eropa. Kondisi ini terus bertambah setiap tahunnya menjadikan Afghanistan sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbesar ketiga di dunia setelah Suriah dan Venezuela. (Amnesty International, 2019). Selain korban jiwa dan pengungsi, konflik yang terjadi diantara Amerika Serikat dan juga pihak kelompok pemberontak Taliban memberikan dampak yang cukup buruk terhadap bidang-bidang lain di negara tersebut seperti pada bidang ekonomi karena akar penyebab hilangnya akses warga Afghanistan terhadap makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan hampir semuanya bersifat ekonomi. Hilangnya sumber mata pencaharian, melonjaknya harga, dan runtuhnya sektor perbankan negara. (Human Rights Watch, 2022). Pada saat yang sama, sistem ekonomi dan perbankan negara secara keseluruhan hampir sepenuhnya dilumpuhkan oleh keputusan AS dan negara lain untuk memotong Bank Sentral Afghanistan secara resmi dari sistem perbankan internasional. Hal ini telah menyebabkan krisis besar-besaran dan kekurangan uang kertas nasional baik dalam dolar AS maupun mata uang Afghanistan. Bank juga menghadapi kesulitan menyelesaikan transaksi dolar yang masuk melalui rekening koresponden di bank swasta di luar negeri, kemungkinan besar karena ketakutan bank asing bahwa mereka mungkin melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Taliban. (Human Rights Watch, 2022)

Begitu juga terhadap kondisi perempuan di Afghanistan dimana Afghanistan menjadi salah satu negara dengan tingkat diskriminasi terhadap wanita paling tinggi di dunia. Ketidakamanan politik dan ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan, kekerasan seksual, dan kesehatan yang buruk dialami oleh perempuan dan anak-anak Afghanistan. Perempuan dan anak perempuan didiskriminasi dalam banyak hal, Mereka dilarang pergi ke sekolah atau belajar, bekerja, keluar rumah tanpa pendamping laki-laki, mengakses perawatan kesehatan yang diberikan oleh laki-laki, dan juga terlibat dalam politik atau berbicara di depan umum, (Amnesty International, 2022). Semakin memburuknya kondisi negara Afghanistan, mengharuskan pemerintah Afghanistan untuk mengambil beberapa kebijakan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama

di negaranya. Namun dengan kondisi negara yang masih dipenuhi dengan konflik dan ketidakstabilan pemerintahan ditambah dengan tingginya tingkat korupsi di negara tersebut, Afghanistan masih tidak dapat menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi di negaranya dikarenakan meningkatnya intensitas konflik dan serangan yang dilakukan baik dari pihak Taliban maupun pihak Amerika Serikat. Di antara sekian banyak organisasi internasional yang memberikan bantuan terhadap upaya penanganan krisis kemanusiaan di Afghanistan, *Catholic Organisation for Relief and Aid Development* atau yang biasa disingkat menjadi Cordaid telah memberikan banyak bantuan terhadap negara Afghanistan secara konsisten dan mencakup banyak sektor kebutuhan yang dimiliki negara tersebut. Cordaid sendiri merupakan sebuah organisasi Katolik yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara yang terdampak konflik yang berbasis di Belanda. (Cordaid.n.d).

Cordaid dibentuk di Den Haag, Belanda pada tahun 2000 dengan bantuan dari pemerintah Belanda dan masih beroperasi sampai saat ini. Terinspirasi dari nilai-nilai injil yang berisi tentang kasih sayang, solidaritas, dan subsidiaritas, Cordaid menjadikannilai-nilai tersebut sebagai visi mereka untuk mengurangi kerapuhan dan kerentanan masyarakat yang menghadapi permasalahan dalam bidang kemanusiaan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan juga masyarakat terdampak perang. (Cordaid, n.d) Cordaid memfokuskan upayanya di beberapa wilayah yang paling banyak dilanda konflik dan paling tidak stabil di dunia salah satunya adalah Afghanistan. Kondisi konflik yang berkepanjangan dengan dampak konflik dan perang yang cukup parah telah menjadikan Afghanistan sebagai salah satu negara yang menjadi fokus Cordaid dalam beroperasi sejak didirikan. (Cordaid, n.d. Cordaid sendiri telah aktif di Afghanistan sejak tahun 2001, di masa awal konflik dan perang di Afghanistan yang menciptakan krisis dalam dua dekade terakhir. Kehadiran lembaga ini di Afghanistan merupakan sebuah misi kemanusiaan dengan tujuan untuk menjadikan Afghanistan yang lebih stabil dan damai dalam waktu yang lama, menggambarkan proses upaya jangka panjang yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi krisis kemanusiaan dengan memberikan bantuan pada 8 bidang bantuan yang dimilikinya yaitu *Health Care, Humanitarian Aid, Security and Justice, Investments, Private Sector Development, Resilience, Food and Income, dan Education*. (Cordaid, n.d)

Cordaid di Afghanistan memiliki kegiatan di sebagian besar negara. Cordaid memberikan bantuan kemanusiaan di tujuh provinsi (Daikundi, Ghor, Herat, Kunduz, Nangarhar, Kandahar, dan Urozgan), memberikan layanan kesehatan di delapan provinsi (Balkh, Ghazni, Herat, Kabul, Kandahar, Nangarhar, Nimruz, dan Paktia) dan mempromosikan pengembangan sektor swasta di tiga provinsi (Kabul, Kandahar, dan Herat). Cordaid mendesentralisasikan pengawasan dan dukungannya dari kantor utamanya di Kabul ke kantor-kantor lapangan regional yang didirikan. (Cordaid, n.d). Pada tahun 2015, setelah pemerintah Belanda memutuskan untuk menghapus sistem pembiayaan bersamanya, Cordaid harus merestrukturisasi operasinya dan mempersempit negara-negara intervensinya menjadi kurang dari 20 negara. Pada saat itu, migrasi dan pemindahan paksa, konflik dan kerapuhan telah menjadi permasalahan utama di dunia. Hal ini pun yang menjadi alasan Cordaid mengubah sasaran bantuannya yang pada awalnya dari negara-negara berkembang menjadi negara-negara yang mengalami kerapuhan dan terdampak krisis kemanusiaan. Cordaid juga lebih jelas menerbitkan laporan tahunan (annual report) mereka terkait perkembangan kerja mereka di Afghanistan sejak tahun 2016. Selain itu, sejak tahun 2016 Afghanistan diketahui mengalami kenaikan akan kebutuhan bantuan kemanusiaan. (Cordaid, n.d)

Sebagai salah satu aktor internasional yang turut berperan dalam upaya jangka panjang bagi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Dari uraian mengenai situasi negara Afghanistan diatas dan adanya keterlibatan Cordaid menjadi dasar penulis untuk meneliti “Upaya Cordaid Dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Tahun 2016 -2022”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan teknik studi literatur. Data-data tersebut berasal dari buku,

jurnal, dan juga internet yang berhubungan dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan dan bagaimana upaya Cordaid sebagai organisasi internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan di negara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Cordaid dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan pada Tahun 2016-2022

Konflik yang panjang dan juga tidak adanya pemerintahan yang kuat dan stabil menjadi penyebab utama terjadinya krisis kemanusiaan di Afghanistan. Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya pemicu yang menjadi penyebab konflik di Afghanistan, baik itu pemicu yang menghasilkan isu konflik yang baru maupun pemicu yang sama dengan sebelumnya dan mengulang faktor penyebab konflik atau akar konflik. Sehingga, penyebab asal dari konflik di Afghanistan sudah tidak jelas lagi dengan munculnya pemicu konflik baru ditambah dengan banyaknya negara yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam konflik di Afghanistan. (Mansbach & Rafferty, 2012). Salah satu penyebab utama dari konflik di Afghanistan adalah ketika Amerika Serikat menjadi salah satu korban terbesar dari pergerakan terorisme yang menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Akibat dari banyaknya serangan terorisme yang terjadi di AS, Pemerintahan Bush kemudian memproklamkan legitimasi serangan preventif dan menekankan konsep perang melawan terror pada tahun 2001 dalam menjalankan salah satu kebijakan luar negerinya yang bernama "*War on Terrorism*" setelah terjadinya gerakan terorisme yang terjadi pada 11 September 2001 oleh kelompok bersenjata Al - Qaeda berupa serangan bunuh diri setelah membajak dan menabrakan empat pesawat Amerika dan menghancurkan gedung World Trade Center di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington D.C yang mengakibatkan banyak kerugian bagi pihak Amerika Serikat termasuk besarnya korban jiwa. Serangan tersebut kemudian dikenal sebagai tragedi 9/11 atau Black September. (PBS News Hour, 2021)

Pada akhir tahun 2001 pasca serangan teroris terhadap AS terjadi, Presiden Amerika Serikat pada saat itu memberikan sebuah permintaan kepada pemerintah Afghanistan yang pada saat itu dipimpin oleh Taliban untuk menyerahkan pemimpin gerakan terorisme Al- Qaeda yaitu Osama bin Laden yang disinyalir bersembunyi di negara Afghanistan. Namun pihak Taliban menolak untuk memenuhi permintaan pemerintah AS untuk menyerahkan

Osama bin Laden. Sikap Afghanistan dipandang AS sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap Osama bin Laden dan mendukung serta melindungi aktivitas kelompok terorisme Al- Qaeda, hal ini kemudian merubah arah kebijakan AS terhadap Afghanistan yang pada awalnya telah memberikan banyak bantuan dalam proses pembangunan negara tersebut menjadi invasi militer dengan berbagai serangan pada negara Afghanistan. (Bergen, 2021)

Penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden dijadikan alasan oleh Bush untuk memasuki dan melakukan invasi militer di Afghanistan dengan tujuan menghancurkan organisasi tersebut. Setelah konflik serangan balasan antara AS dan Osama bin Laden sebelumnya pada tahun 1998, tragedi 9/11 ini memicu konflik antara AS dan rezim berkuasa Taliban akhirnya terus terjadi sejak saat itu dan memperburuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi Afghanistan. (Bergen, 2021)

Selama operasi tersebut berjalan, banyak pelanggaran perang yang melibatkan tentara Amerika Serikat dan juga pihak Taliban, mulai dari serangan, pembunuhan, penculikan dan pengeboman terhadap kelompok sipil dan para anggota organisasi kemanusiaan yang sedang bertugas di negara Afghanistan dan memunculkan banyak korban jiwa yang kemudian menimbulkan kondisi krisis kemanusiaan di negara Afghanistan. (Departement of Defense Office of Inspector General, n.d)

Dampak Konflik Antara Amerika Serikat dan Taliban Terhadap Kondisi Negara Afghanistan

Selama perang yang terjadi di Afghanistan menurut *The Cost of War Project*, perang tersebut telah menewaskan 242.000 orang di Afghanistan termasuk warga sipil, militer, polisi, dan pejuang pihak oposisi. Namun, jumlah korban tewas mungkin lebih tinggi karena kematian yang tidak terhitung oleh penyakit, hilangnya akses ke makanan, air, infrastruktur, dan konsekuensi tidak langsung

lainnya dari perang. Semakin banyaknya pengiriman pasukan perang AS ke Afghanistan semakin banyak pula korban yang ada. Meski pemerintah AS mengklaim bahwa rakyat sipil itu dibunuh dalam serangan-serangan oleh militan Taliban, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa serangan yang dilakukan oleh pihak AS juga menyebabkan kekacauan di Afghanistan yang menghasilkan kematian ribuan penduduk sipil. (Cost of War, 2022). Dampak dari perang yang terjadi di negara Afghanistan tidak hanya berhenti pada korban jiwa, perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga pihak oposisi atau militan Taliban menyebabkan banyaknya terjadi hambatan pemberian bantuan kemanusiaan di negara tersebut. Untuk sejumlah alasan, sangat sulit bagi organisasi – organisasi pemberi bantuan untuk bekerja di Afghanistan. (Cost of War, 2022). Selain tantangan logistik, keuangan, dan tantangan lain di bawah Taliban, kondisi keamanan di negara tersebut juga sangatlah buruk. Misalnya, sejumlah kelompok bantuan dengan afiliasi keagamaan, seperti *International Assistance Mission and Serve*, yang memberikan perawatan mata dan bantuan lain kepada lebih dari tunanetra Afghanistan, diusir oleh Taliban karena mempromosikan agama Kristen. Taliban juga melarang penggunaan komputer atau komunikasi elektronik apa pun, sehingga sangat mengganggu pengiriman bantuan yang ingin disalurkan. Selain itu juga, pernah terjadi penculikan dan pembunuhan staff *People in Need* dan *Save the Children* yang tengah menjalankan tugasnya pada tahun 2015 di provinsi Zabul oleh pihak Taliban dan pendukungnya. (Cost of War, 2022)

Sistem pendidikan Afghanistan juga telah mendapatkan dampak buruk dari konflik berkepanjangan yang terjadi. Bagi banyak anak di negara ini sangatlah susah bahkan hanya untuk menyelesaikan sekolah dasar terutama di daerah pedesaan dan bagi anak perempuan – meskipun baru-baru ini ada kemajuan dalam meningkatkan angka partisipasi. Di daerah termiskin dan terpencil di negara ini, tingkat pendaftaran sangat bervariasi dan anak perempuan masih kekurangan akses yang setara. (UNICEF, n.d). Pada tahun 2015 perkiraan tingkat buta huruf dari populasi orang dewasa adalah 64% dan secara substansial lebih tinggi pada wanita (78%) dibandingkan pria (48%). Pendaftaran sekolah dasar diperkirakan hanya 39% untuk anak laki-laki dan 3% untuk anak perempuan, dan lebih rendah untuk sekolah menengah. Bahkan dengan bantuan komunitas bantuan internasional, pendidikan hanya tersedia bagi 7% dari 4,4 juta anak usia sekolah dasar. Hanya terdapat 5 universitas dan 4 sekolah kedokteran yang dibangun di Afghanistan, namun tidak ada yang berfungsi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sejumlah organisasi kemanusiaan telah berusaha untuk memberikan pendidikan dasar, Taliban melarang banyak buku dan mengizinkan sedikit pendidikan kecuali instruksi agama konservatif. (UNICEF, n.d). Secara keseluruhan, sistem kesehatan Afghanistan peringkat 173 dari 191 negara pada tahun 2015. Setiap indikator status kesehatan mengungkapkan sistem perawatan kesehatan dalam krisis. Harapan hidup rata-rata diperkirakan 45 tahun untuk pria dan 46 tahun untuk wanita, dibandingkan dengan rata-rata negara lainnya yaitu 74,5 dan 80 tahun. Hanya 35% dari populasi yang memiliki akses ke perawatan kesehatan apa pun. Diperkirakan ada 11 dokter, 18 perawat, dan 1 dokter gigi per 100.000 penduduk. Selama 2 dekade terakhir, sebagian besar profesional perawatan kesehatan, serta sebagian besar warga Afghanistan berpendidikan lainnya, terbunuh atau telah melarikan diri dari negara itu. Taliban berusaha untuk membersihkan semua pegawai negeri, termasuk dokter, yang memiliki hubungan dengan pemerintah sebelumnya atau yang tidak mendukung mereka, sehingga semakin menipiskan kelas medis dan profesional. (Cost of War, 2022).

Hampir semua perawatan medis disediakan oleh badan-badan bantuan internasional. Anggaran kesehatan di bawah Taliban dinilai rata-rata US\$700.000 per tahun, atau hanya beberapa sen per orang. Menurut sebuah analisis, jumlah fasilitas kesehatan yang diharapkan untuk populasi 25 juta adalah 6522 fasilitas, termasuk pos kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit kabupaten, provinsi, regional, dan nasional. Namun jumlah total fasilitas kesehatan di Afghanistan saat ini adalah 823 unit. Sehubungan dengan terbatasnya layanan kesehatan di Afghanistan, daerah pedesaan sangat kurang terlayani dibandingkan dengan daerah perkotaan mengakibatkan banyaknya kematian akibat tidak adanya penanganan kesehatan. (Cost of War, 2022). Dengan berbagai ancaman

serangan koalisi terhadap Taliban dan Al-Qaeda, lebih dari 100 lembaga bantuan yang bekerja di bidang kesehatan, makanan, air, sanitasi, dan proyek lainnya terpaksa menarik semua staf asing. *Médecins sans Frontières*, misalnya, yang telah berada di negara itu sejak 1979, menarik staf ekspatriat dari semua lokasi di Afghanistan, dan *International Rescue Committee* juga menjadi salah satu Lembaga yang menarik semua staf kecuali staf nasional mereka. (Cost of War, 2022). Hal ini pun kemudian berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan di Afghanistan termasuk sektor ekonomi karena negara Afghanistan sendiri sangat bergantung pada bantuan dari lembaga – lembaga internasional yang ada selama bertahun-tahun. Badan-badan bantuan dan pembangunan telah menyediakan sebagian besar dana, makanan dan hampir semua perawatan kesehatan di Afghanistan. Secara historis, pendapatan per kapita tahunan negara tersebut diperkirakan antara US\$200 dan US\$800, menjadikan Afghanistan salah satu negara termiskin dan paling tidak berkembang di dunia.

Kondisi selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan hilangnya tenaga kerja dan modal secara progresif, gangguan perdagangan dan transportasi yang hampir menyeluruh. Meskipun negara ini diyakini memiliki kekayaan mineral yang cukup besar (besi, krom, tembaga), sumber daya ini tetap belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kondisi negara yang sangat buruk sehingga hanya terdapat sedikit industri yang signifikan di negara ini. Sebagian besar penduduk (85%) sangat bergantung pada pertanian atau penggembalaan. (Cost of War, 2022). Konflik yang terjadi lebih dari satu dekade tersebut juga secara signifikan mempengaruhi tingkat investasi ke Afghanistan. Masuknya AS pada tahun 2001 ke Afghanistan memang sempat membuka jalur investasi yang secara masif meningkat hingga tahun 2005, namun eskalasi konflik yang memicu perang antara rezim berkuasa yang dibantu AS dengan Taliban kian menghambat laju investasi. Perang menciptakan tantangan bisnis bagi berbagai sektor swasta. Ketidakjelasan hukum pajak, keamanan praktik ekonomi, serta isu korupsi administrasi adalah faktor-faktor yang tercipta selama konflik berkepanjangan di Afghanistan. Penurunan nilai investasi kemudian juga mengikuti dan berbanding sama dengan pengaruhnya pada tingkat ekonomi. (Cost of War, 2022). Selain permasalahan – permasalahan tersebut, konflik yang terjadi di Afghanistan juga mengakibatkan terjadi pengungsian di negara tersebut baik secara internal maupun pengungsian ke negara – negara di sekitar Afghanistan. Sejak tahun 2001, *The Cost of War Project* juga melaporkan setidaknya 5,9 juta warga Afghanistan telah mengungsi secara internal atau telah meninggalkan negara itu, terutama ke Pakistan dan Iran di mana mereka menghadapi situasi politik yang tidak pasti. Banyak juga pemerintah dari negara tetangga yang mendeportasi ribuan warga Afghanistan yang tidak berdokumen tanpa memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan hak hukum untuk tetap berada di negara mereka, atau untuk mengajukan permohonan suaka. Ketika para pengungsi Afghanistan dipulangkan, mereka kembali ke negara yang masih dilanda perang, kemiskinan, dan pelanggaran hukum. (Cost of War, 2022). Para pengungsi wanita yang terlantar menghadapi risiko yang lebih parah. Ketika dipaksa meninggalkan rumah, mereka rentan terhadap perdagangan manusia dan kekerasan berbasis gender, mereka juga memiliki peluang yang sangat terbatas untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pernikahan anak dan kehamilan dini sering mengganggu pendidikan anak perempuan. Tradisi sosial budaya dan peran gender yang sangat diskriminatif menghalangi wanita untuk meningkatkan mata pencaharian mereka.

Selama masa pemerintahannya, Taliban tidak hanya secara brutal memberlakukan pembatasan sosial terhadap perempuan seperti kewajiban mengenakan burqa, tetapi, yang lebih mendasar dan merusak, membatasi akses mereka ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Mereka melarang perempuan tampil di ruang publik tanpa pendamping laki-laki, secara *de facto* menghukum para janda dan anak-anak mereka yang mengakibatkan kelaparan. Taliban juga melarang perempuan memegang pekerjaan, termasuk bekerja sebagai dokter untuk perempuan lain. Alih-alih pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik, perempuan Afghanistan di daerah pedesaan dimana menjadi tempat sekitar 76 persen perempuan di negara itu tinggal mengalami kehancuran akibat pertempuran berdarah dan intens antara Taliban dan pasukan pemerintah serta milisi lokal. (UNWOMEN, 2022). Dengan berbagai rangkaian serangan senjata baik dari pihak AS

maupun pihak kelompok pemberontak Taliban selama dilaksanakannya kebijakan luar negeri AS yaitu *War on Terrorism* di negara Afghanistan yang memberikan dampak cukup berat hampir diseluruh sektor kehidupan bagi negara tersebut dengan terjadinya kekerasan ekstensif yang menimbulkan banyaknya korban jiwa dan perpindahan pengungsi secara besar-besaran, dibutuhkannya bantuan dalam skala besar dan multi-sektoral, terjadinya hambatan atau pencegahan pemberian bantuan kemanusiaan oleh kendala politik dan militer, dan juga risiko keamanan yang signifikan kepada para pekerja bantuan kemanusiaan di beberapa daerah, kondisi ini menempatkan negara Afghanistan dalam status *Complex Humanitarian Emergency*.

Kondisi Pemerintahan Afghanistan

Pada tahun 2001, setelah jatuhnya kelompok Taliban akibat serangan Amerika Serikat, Pemerintah transisi Ashraf Ghani yang baru dibentuk mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di negaranya, namun permasalahan keamanan mempengaruhi semua sektor masyarakat yang juga berdampak pada lemahnya pemerintah dan lembaga negara, yang mengakibatkan tata kelola yang buruk, korupsi yang merajalela dan tantangan nyata untuk proses penyelesaian masalah di negara Afghanistan. (Council on Foreign Relations, n.d). Pemerintah Afghanistan menghadapi tantangan mendasar seperti ketidakamanan, ketergantungan pada bantuan asing, kurangnya inklusi etno-politik, beragam interpretasi Islam, kesenjangan pedesaan-kota dalam pandangan ekonomi dan sosial, dan tetangga regional dengan kepentingan diri yang beragam. Tantangan-tantangan ini terus diperbesar oleh krisis kemanusiaan dan fiskal, kontraksi tajam dalam bantuan asing, hilangnya modal manusia dan sosial, dan kurangnya legitimasi pemerintah Afghanistan. (Council on Foreign Relations, n.d). Selain ketidakstabilan kondisi politik pada internal pemerintahan negara Afghanistan, tingginya tingkat korupsi di negara tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah Afghanistan dalam menyelesaikan permasalahan di negaranya. Meskipun dalam hukum negara Afghanistan telah memberikan hukuman pidana bagi korupsi oleh pejabat namun pemerintah tidak dapat menerapkan hukum secara efektif, dan terdapat banyak laporan pejabat terlibat dalam praktik korupsi dengan impunitas. (Council on Foreign Relations, n.d).

Dengan berbagai permasalahan internal yang terjadi di pemerintahan negara Afghanistan di atas membuat pemerintah Afghanistan masih tidak dapat menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi di negaranya ditambah dengan meningkatnya intensitas konflik dan serangan yang dilakukan baik dari pihak Taliban maupun pihak Amerika Serikat dan hal ini pun yang kemudian menjadikan Afghanistan sebagai salah satu fokus negara yang dibantu oleh Cordaid khususnya pada hal perempuan dan penguatan ekonomi lokal.

Keterlibatan Organisasi Internasional

Afghanistan telah menderita puluhan tahun diakibatkan oleh perang dan konflik yang telah membunuh, mengusir, dan mengganggu jutaan nyawa. Buruknya kondisi yang terjadi di negara tersebut serta ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian menarik perhatian organisasi – organisasi kemanusiaan untuk terlibat didalamnya mulai dari pada saat awal konflik terjadi hingga terjadi imbas dari konflik tersebut. Terdapat beberapa organisasi internasional yang terlibat, diantaranya adalah *International Committee of Red Cross (ICRC)*. ICRC sebagai organisasi kemanusiaan bersifat netral dan mandiri hadir dalam memberikan bantuan ke Afghanistan pada saat konflik terjadi di negara tersebut, Peran yang dilakukan oleh ICRC dalam memberikan bantuan terhadap anak-anak di Afghanistan salah satunya dengan melakukan fisioterapi yang merupakan proses rehabilitasi kepada mereka agar terhindar dari cacat fisik melalui serangkaian penilaian, diagnosis, perlakuan, dan aktivitas pencegahan. (Rahmad, 2019). Selain itu, ICRC juga bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk menyelidiki penjara-penjara tersembunyi di dalam pangkalan-pangkalan AS di pangkalan Bagram dan Kandahar. ICRC berupaya menekankan kewajiban semua pihak yang bertikai di bawah Hukum Humaniter Internasional dan norma-norma yang berlaku lainnya dalam menekan para pasukan penjajah untuk menahan diri dari menyiksa atau melecehkan para tahanan anak. (Rahmad, 2019).

Selain ICRC, dengan tingkat pengungsian baik secara internal maupun pengungsian ke negara tetangga yang sangat tinggi di negara Afghanistan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya memberikan perlindungan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi memberikan bantuannya terhadap negara Afghanistan dengan membantu 1,1 juta orang pada tahun 2021, terutama dengan dukungan musim dingin seperti bahan tempat tinggal, selimut, dan bahan bakar untuk memasak. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2021). UNHCR juga mendukung negara-negara tetangga untuk membantu para pengungsi Afghanistan dan menyediakan uang tunai untuk memperbaiki atau membangun kembali mereka dan proyek untuk menciptakan mata pencaharian. Sejauh ini UNHCR telah memberikan uang tunai dan jenis bantuan lainnya kepada 560.000 warga. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2021). Berbeda dengan organisasi internasional lainnya yang memberikan bantuannya dengan fokus terhadap satu bidang permasalahan, Cordaid mencoba untuk memberikan bantuan terhadap negara Afghanistan secara konsisten dan mencakup banyak sektor kebutuhan yang belum dapat ditangani secara spesifik oleh organisasi internasional lainnya dan dianggap menjadi kebutuhan utama setelah terjadinya perang di Afghanistan guna membangun kembali kesejahteraan negara tersebut. (Cordaid, n.d).

Cordaid sebagai Organisasi Kemanusiaan

Catholic Organisation for Relief and Aid Development atau yang biasa disingkat menjadi Cordaid merupakan sebuah organisasi Katolik yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara yang terdampak konflik yang berbasis di Belanda. Cordaid sendiri memiliki 8 bidang yang menjadi fokus dalam kinerjanya yaitu *health care, humanitarian aid, security and justice, investment, private sector development, food and income, resilient, dan education*. (Cordaid, n.d). Sejauh ini Cordaid telah berhasil memfokuskan upayanya pada beberapa wilayah yang paling sering dilanda konflik dan bergejolak seperti seperti Afghanistan, Burundi, Bangladesh, Kenya, Republik Afrika Tengah, Demokrat Republik Kongo, Ethiopia, Irak, Sudan Selatan, Zimbabwe, Mali dan Myanmar. Cordaid melakukan ini dengan mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial, meningkatkan ketahanan masyarakat dan masyarakat, dan memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah mereka. (Cordaid, n.d).

Upaya Cordaid untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Afghanistan yang paling rentan, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat dan orang sakit kronis, Cordaid memberikan bantuan darurat dan pemulihan dini berbasis kebutuhan kepada mereka yang terkena dampak konflik, termasuk pengungsi internal dan pengungsi yang ke Afghanistan. Cordaid juga bertujuan untuk mengurangi kerentanan orang-orang yang terkena dampak melalui penyediaan makanan dan dukungan mata pencaharian jangka pendek, tempat tinggal dan barang-barang non-makanan, layanan air dan sanitasi. (Cordaid, n.d)

Upaya Cordaid Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

Cordaid sendiri telah aktif di Afghanistan sejak tahun 2001, di masa awal konflik dan perang di Afghanistan yang menciptakan krisis dalam dua dekade terakhir. Kehadiran lembaga ini di Afghanistan pada awalnya merupakan sebuah misi untuk membantu Afghanistan sebagai negara berkembang dalam melakukan pembangunan negaranya khususnya dalam hal pendanaan. Namun pada tahun 2015, Cordaid merubah arah bantuan mereka menjadi lebih fokus terhadap negara - negara yang terdampak oleh permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi. Selama membantu negara Afghanistan dalam mengatasi permasalahan di negaranya, Cordaid telah menjalankan upaya dalam membantu memperbaiki kondisi negara Afghanistan dalam jangka panjang dan bersifat multisectoral melalui program kerja *Bright Future, Shelter for Women, dan The Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding* (CSPPS). (Cordaid, n.d).

Upaya Cordaid Dalam Bidang Ekonomi Melalui *Bright Future*

Bright Future merupakan program kerja yang dilakukan oleh Cordaid melalui unit usahanya yaitu Cordaid Investment Management dalam upaya meningkatkan sektor swasta negara Afghanistan yang terkena dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Taliban. Dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Belanda, Cordaid menjadi pemimpin konsorsium untuk mengimplementasikan Program Bright Future di Afghanistan. Pelaksanaan Bright Future dimulai pada Juni 2017, dengan *The 1% Club*, *Bayat Foundation* dan Hamida Barmaki sebagai mitra. Program ini berfokus pada penguatan ekonomi lokal dan memberikan pendapatan yang berkelanjutan, khususnya untuk pria dan wanita muda di Afghanistan. Program ini membahas lima tahap paralel yang saling terkait sedemikian rupa sehingga mereka saling menguatkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat keseluruhan ekosistem bisnis UKM di Afghanistan dan untuk menyediakan generasi muda dengan pendapatan yang berkelanjutan. (Cordaid, 2019)

Di tahap 1 selama 2017, Cordaid memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada 54 pemuda Afghanistan dengan keterampilan agar lebih cocok untuk pasar kerja dan 22 di antaranya mendapatkan magang. Pada tahun yang sama, dalam tahap 2 Cordaid memberikan dukungan kepada 30 anak muda Afghanistan untuk mengembangkan start-up mereka. Setelah tahap 2 dengan kursus pelatihan dan lokakarya bisnis, 23 pengusaha muda berkesempatan untuk mengajukan modal awal melalui *crowdfunding* di website resmi *Bright Future*. Setelah 18 dari mereka berhasil melakukannya, jumlah *crowdfunded* di isi ulang dengan pencocokan dana, yang memungkinkan mereka untuk berhasil memulai sendiri bisnis. (Cordaid, 2019)

Pada tahun 2018, Cordaid dan mitra lokalnya memulai dengan mengimplementasikan tahap 3 yang melakukan sosialisasi agar terciptanya iklim bisnis yang lebih baik untuk pengusaha muda Afghanistan dengan menciptakan ekosistem yang bisa melayani perusahaan rintisan dan usaha kecil. Dalam tahap 4, fondasi telah diletakkan pada mekanisme keanggotaan untuk memungkinkan kaum muda terhubung ke berbagai pusat bisnis di Kabul. Sebagai bagian dari tahap 5, mitra konsorsium Cordaid Hamida Barmaki melatih 144 orang pada tahun 2018 tentang topik hukum untuk bisnis: 60 pemerintah official dan 84 peserta tahap 1 dan 2. (Cordaid, 2019)

Melalui program *Bright Future*, Cordaid telah berhasil membantu negara Afghanistan dalam mengembangkan sektor swasta dengan hasil terdapat 141 pemuda yang bisa memulai bisnis mereka secara mandiri. Dari jumlah tersebut, 87 bisnis mampu menarik modal awal melalui *crowdfunding* yang dilaksanakan oleh Cordaid dan juga menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk warga Afghanistan. (Cordaid, 2019)

Upaya Cordaid Dalam Bidang Pengungsi Melalui *Shelter for Women*

Shelter for Woman merupakan sebuah program kerja yang bertujuan untuk membantu pemerintah Afghanistan dalam mengatasi pengungsi khususnya para wanita karena di antara banyak pengungsi, rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi tantangan terberat karena mereka pada umumnya tidak memiliki hak untuk bepergian sendiri, bersekolah, mencari nafkah, bahkan memiliki harta benda. Meskipun tingkat kematian wanita tidak setinggi yang terjadi pada pria, namun setiap korban pria yang jatuh dalam perang merupakan awal dari rantai kesulitan bagi perempuan dan anak-anak dimana mereka kehilangan kepala keluarganya dan pencari nafkah utama di keluarga tersebut ditambah dengan tingkat diskriminasi terhadap wanita yang sangat tinggi di negara Afghanistan sendiri. (Cordaid, 2019)

Melalui program kerja ini Cordaid telah membangun 102 tempat penampungan permanen dan 250 tempat penampungan sementara. Para wanita mengambil peran aktif, mengelola bagian proses konstruksi, menyediakan sumber daya tambahan dan mengatur tenaga kerja dan dukungan lainnya. Proyek ini juga termasuk pelatihan bagi perempuan, laki-laki dan anak-anak, meliputi masalah hak asasi manusia, promosi kebersihan dan pemeliharaan teknis. Bantuan ini diharapkan akan meningkatkan kesehatan, keamanan, martabat para wanita di Afghanistan. Begitu mereka memiliki rumah, mereka memiliki tempat untuk bekerja, untuk memproduksi barang-barang yang

dapat mereka jual, dan dengan demikian memperoleh penghasilan dan menggunakannya untuk kebutuhan dasar sehari-hari. (Cordaid, 2019)

Upaya Cordaid Dalam Bidang Pembangunan Masyarakat Melalui *The CivilSociety Platform for Peacebuilding and Statebuilding* (CSPPS)

CSPPS merupakan sebuah program kerja Cordaid yang bertujuan untuk memperkuat suara dan kapasitas masyarakat untuk secara efektif terlibat dalam pembangunan perdamaian dan pembangunan negara sebagai kontribusi penting untuk pencegahan krisis dan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan untuk semua dengan cara :

Memperkuat dan memperluas keterlibatan dan inklusi masyarakat sipil dalam pembangunan perdamaian, pembangunan negara, dan pencegahan krisis

Mempengaruhi pencegahan, pembangunan perdamaian, pembangunan negara dan kebijakan pembangunan di semua tingkatan

Membentuk dan menanamkan IDPS, SDG, dan proses kemanusiaan dengan nilai-nilai pembangunan perdamaian (Cordaid, 2019)

CSPPS memiliki 3 aspek penting dalam melaksanakan tujuannya untuk memastikan pembangunan koalisi masyarakat sipil di tingkat negara dan untuk memberikan dukungan pengembangan kapasitas kepada anggota masyarakat sipil dengan cara mengamankan ruang politik bagi masyarakat sipil melalui *Networking, Amplify, dan Lobby*. (Cordaid, 2019)

Di Afghanistan sendiri Cordaid melalui CSPPS bertujuan meningkatkan perhatian internasional dan komitmen untuk melibatkan perempuan secara bermakna dalam proses perdamaian. Cordaid mencoba untuk menyatukan wanita dari seluruh negeri untuk menyampaikan suara mereka di Afghanistandan untuk membangkitkan solidaritas dari wanita di seluruh dunia. (Cordaid, 2019)

4. KESIMPULAN

Cordaid sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan hadir secara mandiri berupaya untuk membantu permasalahan krisis kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut dengan melakukan beberapa program kerja seperti *Bright Future, Shelter for Women, dan The Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding* (CSPPS). Dilihat dari bagaimana pencapaian Cordaid dalam menjalankan program-program kerjanya, peran Cordaid telah cukup signifikan dalam menangani beberapa permasalahan di Afghanistan, namun Cordaid dirasa belum mampu dalam menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan secara keseluruhan yang terjadi di Afghanistan karna upaya yang dilakukan oleh Cordaid masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh negara Afghanistan. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya konflik pada negara tersebut di akhir tahun 2021 dengan jatuhnya pemerintahan ke tangan kelompok pemberontak Taliban dan diikuti dengan penarikan seluruh pasukan Amerika Serikat dari negara Afghanistan yang membuat Cordaid menghentikan segala bentuk upayanya dalam membantu Afghanistan dan menarik seluruh staf yang berada dinegara tersebut karna Cordaid berpendapat bahwa mereka tidak ingin melakukan kerjasama dengan Taliban yang dianggap sebagai kelompok Terrorism.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2019). Afghanistan's refugees: forty years of dispossession. Anderson, M., & Gerber, M. (2018). Health in Humanitarian Emergencies.
- Archer, C. (2001). International Organization. London-New York.
- Bergen, P. L. (2021, September 24). September 11 Attacks. Tersedia di <https://www.britannica.com/event/September-11-Attacks>
- Cordaid. (2019). Cordaid Annual Report 2019. Tersedia di <https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/11/2020/09/Cordaid-Annual-Report-2019web.pdf>

- Cordaid. (n.d). Cordaid in Afghanistan. Retrieved from Cordaid: <https://www.cordaid.org/en/countries/afghanistan>
- Cordaid. (n.d). Our History. Retrieved from Cordaid: <https://www.cordaid.org/en/who-we-are/our-history/>
- Cost of War. (2022). Human and Budgetary Costs Date U.S War in Afghanistan 2001- 2022. Tersedia di <https://watson.brown.edu/costofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022>
- Council on Foreign Relations. (n.d). The U.S War in Afghanistan. Tersedia di <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>.
- Departement of Defense Office of Inspector General. (n.d). Lead Inspector General for Operation Freedom's Sentinel. Tersedia di <https://www.dodig.mil/Reports/Lead-Inspector-General-Reports/Article/2620963/lead-inspector-general-for-operation-freedoms-sentinel-i-quarterly-report-to-th>.
- Human Rights Watch. (2022). Afghanistan: Economic Roots of the Humanitarian Crisis.
- Mansbach, R. W., & Rafferty, K. L. (2012). Pengantar Politik Global (Terj.). Bandung: Nusa Media.
- Rahmad, Y. J. (2019). Peran International Committee of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2013 - 2016.
- Situmorang, M. (1999). Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- United Nation High Commissioner for Refugees. (2021). UNHCR Position on Returns to Afghanistan. Tersedia di <https://reliefweb.int/report/afghanistan/unhcr-position-returns-afghanistan-august-2021>
- UNWOMEN. (2022). In focus: Women in Afghanistan one year after the Taliban takeover. Tersedia di <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/08/in-focus-women-in-afghanistan-one-year-after-the-taliban-takeover>